

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Saat ini para auditor banyak mendapati perhatian publik atas kasus yang timbul berkaitan dengan pekerjaannya, tidak lain termasuk auditor pemerintah. Auditor pemerintah ialah auditor yang berprofesi pada entitas pemerintah dan bertindak melaksanakan audit atas laporan keuangan yang disajikan oleh entitas pemerintah. Auditor yang bekerja di pemerintahan Indonesia yaitu auditor yang bekerja pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan institusi pajak.

Kasus yang berkaitan dengan auditor pemerintah sebagaimana menjadi perhatian yaitu diperoleh informasi bahwa Sri Mulyani Indrawati menyatakan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tidak berarti terbebas dari korupsi, korupsi bisa terjadi karna berbagai macam modus. Menteri Keuangan ini menjelaskan, penyalahgunaan dalam penganggaran bisa saja terjadi apabila dalam laporan masih ada mark up. Asal dilakukan dengan sesuai kaidah akuntansi yang benar, penyalahgunaan tersebut tidak akan terlihat dalam audit rutin BPK. Hal tersebut sebagai peringatan supaya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK kepada pegawai BPK atas dugaan pemberian Opini WTP laporan keuangan agar tidak terulang kembali. Karena berdasarkan pengamatan dari kasus OTT tersebut sejumlah kepala daerah yang mendapatkan opini WTP justru terjerat kasus korupsi. Banyak berita beredar terkait Laporan Keuangan

Pemda yang meraih WTP namun Korupsi tetap berjalan. Seharusnya, Laporan yang telah meraih predikat WTP mampu menjadi pijakan tata kelola keuangan yang baik dan mengurangi praktek korupsi.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini audit yang dikeluarkan ketika auditor tidak menemukan atau bebas dari salah saji material, jika pun ada salah saji tersebut tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Namun Opini WTP bukan berarti terbebas dari korupsi, bisa pun korupsi yang lolos dari BPK saat audit. Tetapi mungkin juga terjadi WTP yang kemungkinan masih terjadi korupsi jika independensi seorang auditor tersebut kurang baik seperti kasus yang terjadi di Purbalingga tentang kasus suap proyek dan kasus Ali Sadli seorang Auditor yang menerima Suap Opini WTP terhadap KemendesPDTT.

Tasdi adalah seorang bupati Purbalingga yang telah menjabat selama 2,5 tahun. Dalam periode tersebut beliau telah memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk laporan tahun 2017 dan 2018. Purbalingga juga mendapatkan 20 rekor muri dalam berbagai kegiatan dibawah pimpinan beliau. Dirinya ditangkap KPK pada 5 juni 2018 karena terduga menerima suap atas proyek pembangunan Islamic Center (Reza, 2018). Kemudian kasus Ali Sadli yang terbukti menjadi perantara penerimaan suap oleh Rochmad Saptogiri dari dua pegawai KemendesPDTT Sugito dan Jarot. Dijatuhi pidana penjara selama sepuluh tahun dan denda sebesar Rp.300 juta subsider enam bulan kurungan. Ali sadli sebagai auditor BPK menerima gratifikasi sebesar Rp.9.896.180.000 yang sebenarnya penerimaan sahnya diakumulasikan hanya

sebesar Rp.1.728.656. Ali sadli dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan memperkaya diri sendiri dengan menggunakan jabatannya (Amalia, 2018). Suap merupakan tindakan yang curang dan tidak dapat dijadikan contoh yang baik. Sesungguhnya hal tersebut sudah diperingatkan dalam Al-Quran mengenai kecurangan.

*Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam siffin. Allah menegur sekali lagi perilaku mereka, 'sekali-kali jangan begitu; jangan berbuat curang! sesungguhnya catatan perbuatan orang yang durhaka, berbuat jahat, melanggar aturan agama, dan merugikan orang lain dalam bentuk apa pun, benar-benar tersimpan dengan baik dalam siffin. Surat Al-Muthaffifin: 7*

Kecurangan (*fraud*) dengan kekeliruan (*error*) merupakan istilah yang berbeda (Widiyastuti & Pamudji, 2009) dan (Prasetyo, 2015). Hal yang membedakan keduanya ialah perbuatan yang melandasinya, apakah dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Bila hal itu di lakukan dengan sengaja, maka dikatakan kecurangan (*fraud*) tetapi bila di lakukan dengan tidak sengaja maka dikatakan kekeliruan (*error*). Terdapat berbagai unsur yang dapat menyebabkan *fraud* seperti lemahnya penanggulangan internal, konflik kepentingan, ketidakjujuran , dan lain sebagainya. Saat menjalankan tugasnya sebagai auditor yang independen, termasuk pendeteksian kecurangan pada laporan keuangan, auditor harus menangkap sinyal *red flags*, memiliki sikap skeptisisme, kompetensi serta independensi. Dengan demikian, auditor perlu memiliki dan mempertahankan sikap serta keahlian tersebut supaya ia bisa mendeteksi

kecurangan pada laporan keuangan juga melakukan pekerjaan selaku auditor yang profesional.

Untuk mendukung kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan yang mungkin timbul disaat melaksanakan auditnya, auditor butuh pemahaman mengenai kecurangan, tipe, karakteristik dan cara untuk mendeteksi. Cara yang bisa digunakan yaitu mengamati tanda- tanda atau sinyal (*red flags*) satu tindakan yang mungkin mendatangkan timbulnya kecurangan. *Red flags* ialah suatu keadaan yang lain dengan keadaan yang normal. Artinya, *red flags* merupakan petunjuk yang menandakan adanya sesuatu yang tidak seharusnya dan membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Pemahaman *red flags* dan pemeriksaan lanjut akan memudahkan langkah auditor untuk mendapatkan bukti dan mendeteksi apakah terjadi kecurangan atau tidak.

Kemudian, auditor yang profesional perlu adanya sikap skeptisme profesional yang dimana hal tersebut merupakan pemikiran yang kerap mempertanyakan serta mengevaluasi secara perseptif terhadap bukti audit. Bersama adanya sikap tersebut auditor tak akan mudah menadah penjelasan klien seperti itu saja, tetapi akan mempertanyakan supaya memperoleh bukti serta konfirmasi tentang apa yang menjadikan masalah sehingga memudahkan auditor untuk mewaspadaai adanya *red flags*. Untuk itu maka auditor juga perlu memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan tugasnya. Seorang auditor perlu memiliki kecapakan yang memadai guna melaksanakan tugasnya dalam pemeriksaan. Maka auditor wajib memiliki kompetensi yang didapatkan melalui pengetahuan, keahlian serta pengalamannya.

Selain itu, sikap independensi juga perlu dalam diri seorang auditor. Sikap independensi merupakan sikap dimana seorang auditor dituntut untuk tidak memihak kepada siapapun. Tanpa kedapatan sikap independensi, maka auditor tidak bermakna apapun. Masyarakat akan sulit mengakui hasil auditnya sehingga masyarakat enggan meminta jasa auditan dari auditor Setyaningrum (2010) dalam (Prasetyo, 2015).

Auditor yang profesional juga perlu adanya pemahaman mengenai apa saja yang termasuk dalam skema kecurangan. Pemahaman skema kecurangan sangatlah penting untuk seorang auditor, memikirkan sumber kecurangan yang terbesar terletak pada penyalahgunaan aset instansi yang keamanannya di jaga oleh auditor tersebut. Pemahaman ini dapat menjadi bekal untuk para auditor dalam melaksanakan tugasnya mendeteksi kecurangan.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai deteksi kecurangan oleh auditor. Dikemukakan bahwa penelitian dari (Prasetyo, 2015) dan (Arsendy, 2017) menyatakan *red flags*, skeptisme profesional, dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan, akan tetapi independensi dari penelitian (Prasetyo, 2015) berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Hal tersebut didukung pula dengan penelitian dari (Karamoy & Wokas, 2015) menyatakan independensi berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Hal yang lebih mengejutkan dikemukakan oleh penelitian (Suryanto, Indriyani, & Sofyani, 2017) menyatakan skeptisme profesional berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas dan beberapa penelitian terdahulu, terdapat perbedaan hasil penelitian. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian sebelumnya yang diteliti oleh (Arsendy, 2017) dan (Yanti, 2013) yang memiliki perbedaan berdasarkan objek penelitian dan variabel yang digunakan. Penelitian dari Arsendy memiliki empat variabel independen yaitu pengalaman audit, skeptisme profesional, *red flags* dan tekanan anggaran waktu sedangkan penelitian dari Yanti sebuah penelitian deskriptif yang terdiri atas beberapa variabel yaitu *red flags*, skema kecurangan, mekanisme deteksi dan mekanisme preventif. Objek yang diteliti dari kedua penelitian tersebut ialah KAP dan BPK, Arsendy menggunakan objek penelitian di KAP daerah riau sedangkan Yanti menggunakan objek penelitian dari KAP auditor eksternal dan auditor internal serta ada pula auditor pemerintah dari BPK yang berasal dari Jakarta.

Penelitian ini terdiri dari lima variabel independen yaitu *red flags*, skeptisme profesional, independensi, kompetensi dan skema kecurangan dengan objek penelitian di Badan Pemeriksa Keuangan-RI Perwakilan Lampung dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung. Peneliti menambahkan variabel kompetensi yang sebelumnya diuji oleh (Prasetyo, 2015) yang menjadi acuan dari penelitian (Arsendy, 2017) karena variabel tersebut tidak diuji kembali oleh Arsendy. Peneliti juga menambahkan variabel skema kecurangan dari penelitian Yanti (2013) karena menurut peneliti variabel tersebut akan berpengaruh dengan faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Peneliti memilih objek penelitian di Badan Pemeriksa Keuangan-RI Perwakilan Lampung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung karena peneliti tertarik akan predikat di beberapa daerah kabupaten wilayah Lampung yang mendapatkan Predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan-RI Perwakilan Lampung seperti Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung selatan, Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang, Metro, Pringsewu, Lampung Barat, Bandar Lampung, Pesawaran, Way kanan, Tubaba dan Lampung Utara. Peneliti juga yakin pasti kembalinya kuisioner yang disebarakan dengan respon yang amat baik dengan didorong kesediaannya dari Badan Pemeriksa Keuangan-RI Perwakilan Lampung. Penelitian ini memberi beberapa kontribusi untuk mengetahui serta merevisi kinerja auditor di Indonesia, apakah kinerja auditor telah sesuai dengan yang diharapkan. Menjadikan informasi untuk para mahasiswa dan masyarakat sebagai pembelajaran dan pengetahuan umum. Oleh karena itu, penulis tergoda untuk melaksanakan penelitian selanjutnya dengan judul: **“Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan (Studi Empiris pada Auditor Pemerintah BPK RI Perwakilan Lampung dan BPKP Provinsi Lampung)”**.

## **B. Batasan Masalah**

1. Penelitian ini dibatasi hanya untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi auditor untuk mendeteksi kecurangan. Faktor tersebut terdiri dari *red flags*, kompetensi, independensi, skeptisme profesional, dan skema kecurangan.
2. Penelitian ini juga dibatasi oleh subjek penelitian yaitu auditor yang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan wilayah Lampung.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Apakah *red flags* berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
3. Apakah independensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
4. Apakah skeptisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
5. Apakah pemahaman skema kecurangan berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji pengaruh *red flags* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan
2. Untuk menguji pengaruh kompetensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan
3. Untuk menguji pengaruh independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan
4. Untuk menguji pengaruh skeptisme profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan
5. Untuk menguji pengaruh pemahaman skema kecurangan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang teoritis dan praktisi.

##### **a. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat menjadikan referensi untuk akademisi yang ingin menambah wawasan dan pengetahuan terkait faktor pengaruh tentang kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian ini diharapkan juga dapat mampu dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya mengenai faktor apa saja yang dapat menjadikan kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi sebuah kecurangan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi BPK serta para Akuntan untuk menetapkan kebijakan guna pencegahan terjadinya *fraud* (kecurangan). Dan juga sebagai revisi kinerja para Akuntan untuk menjadi lebih baik kedepannya dalam melaksanakan tugasnya secara profesional.

